

ABSTRAK

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan, termasuk di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda, Kabupaten Bandung. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi PHBM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi yang menaungi program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III, yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengelola Tahura Ir. H. Juanda, aparat pemerintah terkait, dan masyarakat yang terlibat dalam program PHBM. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di Tahura Ir. H. Juanda belum berjalan optimal. Dari sisi komunikasi, sosialisasi program belum berlangsung secara merata dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah petugas lapangan, anggaran, dan sarana pendukung menjadi hambatan utama. Dari sisi disposisi, komitmen pelaksana cukup baik namun belum ditunjang oleh motivasi dan konsistensi tindakan di lapangan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, masih terdapat tumpang-tindih kewenangan serta SOP yang belum terlaksana secara konsisten sehingga menghambat koordinasi antar pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PHBM di kawasan Tahura Ir. H. Juanda memerlukan perbaikan terutama pada aspek komunikasi dan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, serta penguatan komitmen pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PHBM, Tahura H. Djuanda, Kebijakan Lingkungan

ABSTRACT

The Community-Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM) policy aims to involve local communities in the management and preservation of forest areas, including the Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda in Bandung Regency. However, its implementation still encounters several challenges, particularly related to policy communication, resource availability, implementer disposition, and the bureaucratic structure governing the program. This study aims to analyze the implementation of the PHBM policy in Tahura Ir. H. Juanda using George C. Edward III's implementation theory, which includes the indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative method with data collection techniques consisting of observation, in-depth interviews, and documentation studies. The informants include Tahura Ir. H. Juanda managers, related government officials, and community members involved in the PHBM program. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the PHBM policy in Tahura Ir. H. Juanda has not yet been fully optimal. In terms of communication, program dissemination has not reached all community groups and remains inconsistent. Regarding resources, limitations in staff availability, budget allocation, and supporting facilities constitute major obstacles. In terms of disposition, implementers demonstrate sufficient commitment, yet their motivation and consistency in field execution remain lacking. Meanwhile, the bureaucratic structure still shows overlapping authorities and inconsistently implemented SOPs, which hinder coordination among stakeholders. Overall, the study concludes that PHBM implementation in Tahura Ir. H. Juanda requires significant improvements, particularly in communication strategies, institutional coordination, enhancement of human resources and budget capacity, as well as strengthening implementers' commitment. These improvements are essential to ensure that the policy can function more effectively and provide tangible benefits to sustainable community-based forest management.

Keyword: Policy Implementation, Community-Based Forest Management (PHBM), H. Djuanda Grand Forest Park, Environmental Policy.